



**Bagaimana memastikan tata kelola pemerintahan yang baik pada institusi aparat penegak hukum**

## **Isu Strategis 2**



# CAPAIAN

## A. Terlibatnya IJRS dalam kelompok kerja di sektor K/L

Terlibat sebagai anggota  
Kelompok Kerja (Pokja)  
Akses Keadilan di Kejaksaan.



Terlibat  
sebagai  
anggota  
beberapa  
Kelompok  
Kerja  
(Pokja) di  
Mahkamah  
Agung.



Terlibat sebagai anggota Kelompok  
Kerja (Pokja) Penyusunan Standar  
Layanan Bantuan Hukum (Bankum).



Diterbitkannya Peraturan  
Kemenkumham No. 4  
Tahun 2021 tentang  
Standar Layanan  
Bantuan Hukum.

# CAPAIAN

- B.** Terlibat aktif bersama koalisi masyarakat sipil untuk sektor keadilan pada penyusunan Rencana Aksi (RENAKSI) Open Government Indonesia (OGI)



Penerapan komitmen dalam **RENAKSI OGI** mendorong adanya kolaborasi antar CSO untuk memperluas akses akan keadilan bagi masyarakat di berbagai isu.

- C.** Terlibatnya IJRS dalam penyusunan indikator RPJMN 2020 – 2024

Hal ini tidak terlepas dari pengaruh konsorsium masyarakat sipil untuk penyusunan indeks akses keadilan dengan melakukan **komunikasi secara intensif dengan Kementerian PPN/Bappenas** selama penyusunan indeks akses keadilan di Indonesia.



# Informasi selengkapnya, baca Laporan Tahunan di website IJRS ya!

Save dulu biar gak lupa,  
Share dulu biar  
banyak orang tahu!



[www.ijrs.or.id](http://www.ijrs.or.id)